



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO, KIMIA, FARMASI, DAN TEKSTIL  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI INDUSTRI, KETENAGAKERJAAN, DAN PARIWISATA  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eripson M. H. Sinaga

Jabatan : Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dida Gardera

Jabatan : Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

Pihak kedua,

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri,  
Ketenagakerjaan dan Pariwisata

  
Dida Gardera

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Pengembangan Industri  
Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil

  
Eripson M. H. Sinaga

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO, KIMIA, FARMASI, DAN TEKSTIL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas	1.1	Peningkatan Kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB	3,9%
2.	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas	2.1	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Hilirisasi Industri Agro	80%
		2.2	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri	80%
		2.3	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki di Pasar Domestik dan Global	80%
3.	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas	3.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil	3 dari 4
4.	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas	4.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil	92%

**Kegiatan**

1. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri di Sektor Agro
2. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri di Sektor Kimia dan Farmasi serta Pengolahan Bahan Galian Non Logam
3. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri di Sektor Tekstil, Produk Tekstil, dan Alas Kaki
4. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri di Sektor Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi serta Berorientasi Ekspor

**Anggaran**

Rp 289.220.000,-

Rp 566.830.000,-

Rp 289.220.000,-

Rp 866.085.000,-

**Total**

**Rp2.011.355.000,-\***

(Dua Miliar Sebelas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)

Pihak kedua,


Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri,  
Ketenagakerjaan dan Pariwisata



**Dida Gardera**

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Pengembangan Industri  
Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil



**Eripson M. H. Sinaga**

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO, KIMIA, FARMASI, DAN TEKSTIL  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI INDUSTRI, KETENAGAKERJAAN DAN PARIWISATA

KODE IKU : 1.1

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas

## Deskripsi Sasaran Strategis

Industri pengolahan memiliki peran strategis dalam struktur perekonomian Indonesia dan merupakan kontributor utama Produk Domestik Bruto (PDB). Pada tahun 2024, industri pengolahan menyumbang 18,98% terhadap total nilai tambah PDB Indonesia. Kontribusi ini menunjukkan tren peningkatan yaitu 18,67% pada tahun 2023 dan 18,34% pada tahun 2022. Secara keseluruhan, pada tahun 2024 industri pengolahan mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,43%(yoy), didukung dari pertumbuhan sub-sektor migas sebesar 1,04% (yoy) dan sub-sektor non-migas sebesar 4,75% (yoy).

RPJMN 2025-2029 menempatkan industri pengolahan sebagai kunci untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. RPJMN 2025-2029 menargetkan pertumbuhan sektor industri pengolahan sebesar 5,50% (yoy) pada tahun 2025 atau 20,8% terhadap PDB dan meningkat menjadi 8,14% (yoy) pada tahun 2029 atau 21,9% terhadap PDB. Upaya-upaya transformatif untuk mendorong pertumbuhan industri pengolahan, seperti: (i) Peningkatan investasi dan produktivitas; (ii) Pengembangan sumber daya manusia yang kompeten; (iii) Penggunaan teknologi baru dan inovasi; dan (iv) Peningkatan akses pasar dan ekspor.

Guna mendukung pencapaian target RPJMN, pada tahun 2025 khususnya untuk sektor Industri Pengolahan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan Sasaran Strategis yaitu "Terwujudnya Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas". Sasaran Strategis ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri pengolahan yang (i) berkualitas dan berdaya saing, (ii) memberikan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis SDA unggulan; serta (iii) menguatkan industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi, dan berorientasi ekspor. Arah kebijakan dalam Sasaran Strategis ini sejalan dengan Prioritas Nasional 5 (PN 5) RPJMN Tahun 2025 s.d 2029.

## Indikator Kinerja Utama (IKU)

1.1. Peningkatan Kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB

## Deskripsi IKU

### Definisi

Prioritas Nasional 5 (PN 5) dalam RPJMN 2025-2029 menargetkan terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri pengolahan melalui pembangunan fondasi industrialisasi yang bernilai tambah tinggi, terintegrasi, dan berdaya saing global. Keberhasilan sasaran ini dicapai salah satunya melalui **peningkatan kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IAKFT) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)**. Peningkatan Kontribusi Industri IAKFT adalah kondisi di mana PDB nominal yang berasal dari sektor IAKFT pada periode tertentu (periode pengukuran) mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan PDB nominal ini secara langsung juga mencerminkan peningkatan laju pertumbuhan sektor IAKFT pada periode tersebut.

Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBUI) dari BPS, Industri AKFT pada Sektor Industri Pengolahan mencakup 9 sub-bidang yaitu: (i) Industri Makanan dan Minuman; (ii) Industri Pengolahan Tembakau; (iii) Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman; (iv) Industri Furnitur; (v) Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional; (vi) Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik; (vii) Industri Barang Galian bukan Logam; (viii) Industri Tekstil dan Pakaian Jadi; dan (ix) Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki. Dalam pelaksanaannya, Asisten Deputi Pengembangan IAKFT berkoordinasi erat dengan Kementerian Perindustrian sebagai mitra kerja utama di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Berdasarkan BPS (2025), pada tahun 2024, Industri AKFT mencatatkan kontribusi signifikan sebesar 63,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sektor industri pengolahan. Peran strategis masing-masing sub-sektor adalah (i) Industri Agro menyediakan bahan baku utama contohnya bagi industri makanan, minuman, dan tekstil (serat alam); (ii) Industri Kimia dan Farmasi, menyediakan input penting dalam proses produksi di industri agro (pupuk, pestisida), tekstil (pewarna, bahan finishing), bahan aktif obat, hingga manufaktur secara umum; dan (iii) Industri Tekstil dan Produk Tekstil sebagai padat karya memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas yaitu penyerapan tenaga kerja dalam skala besar. Untuk mencapai target tersebut dan melihat signifikansi peran sektor IAKFT maka, Asisten Deputi Pengembangan IAKFT berfokus pada koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan sektor industri pengolahan non-migas, khususnya Industri AKFT.

### Formula

Berdasarkan RPJMN 2025-2029, Peningkatan kontribusi industri pengolahan terhadap PDB ditargetkan sebesar 5,50% di tahun 2025 dan 8,14% di tahun 2029. Melalui analisis tren pertumbuhan tahun 2021-2024 menggunakan metode *Forecast.Linear* pada Microsoft Excel, diperoleh rincian target antara untuk tahun 2026 s.d. 2028 yaitu sebesar 5,70%, 6,85%, dan 7,81%.

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Asdep AKFT tahun 2026 ditetapkan dengan mengacu pada proporsi historis dari tahun 2019-2024 sektor AKFT terhadap industri pengolahan secara keseluruhan dikalikan dengan proyeksi pertumbuhan PDB industri pengolahan tahun 2026 sebesar 6%. Evaluasi efektivitas program dilakukan dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dengan realisasi di lapangan. Data capaian bersumber dari Kontribusi PDB Lapangan Usaha yang dirilis secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Adapun formula pengukuran peningkatan kontribusi Industri AKFT (IAKFT) adalah sebagai berikut:

$$\text{Peningkatan kontribusi IAKFT terhadap PDB(\%)} = \sum \frac{(PDB \text{ IAKFT}_t - PDB \text{ IAKFT}_{t-1})}{PDB \text{ IAKFT}_{t-1}} \times 100\%$$

Kontribusi Industri AKFT merupakan kumulatif (penjumlahan) dari 9 sub-bidang industri pengolahan, yaitu:

1. Industri Makanan dan Minuman
2. Industri Pengolahan Tembakau
3. Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman
4. Industri Furnitur
5. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional
6. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik
7. Industri Barang Galian bukan Logam
8. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi
9. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki

#### Tujuan

Mendorong peningkatan daya saing ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas melalui peningkatan kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IAKFT)

#### Satuan Pengukuran

Persentase (%)

#### Unit/Pihak Penyedia Data

Badan Pusat Statistik

#### Pejabat Penanggung Jawab Data

Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil

#### Sumber Data

Dokumen Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Lapangan Usaha, Badan Pusat Statistik

#### Tingkat Kendali IKU

(.....) High (X) Moderate (....) Low

#### Tingkat Validitas IKU

(X) Exact (....) Proxy (.....) Activity

#### Jenis Konsolidasi Periode

(.....) Sum (.....) Average (X) Take Last Known Value

#### Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (... ) Cascading Non Peta (.....) Non-Cascading

#### Metode Cascading

(X) Direct (... ) Indirect

#### Polarisasi IKU

(X) Maximize (.....) Minimize (.....) Stabilize

#### Periode Pelaporan

(....) Bulanan (... ) Triwulanan (....) Semesteran (x) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	3,27%	4,95%	3,58%	5,3%	3,9%
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	-

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

<b>ASISTEN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO, KIMIA, FARMASI, DAN TEKSTIL</b>	<b>KODE IKU: 2.1</b>
<b>KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN</b>	

<b>Sasaran Strategis</b>	SS.2 Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang berkualitas
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	<p>Kebijakan yang berkualitas ditandai oleh kejelasan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta keterkaitannya dengan visi, rencana pembangunan, dan mandat kelembagaan. Kebijakan yang berkualitas disusun melalui proses yang inklusif dan terkoordinasi, dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait serta mempertimbangkan keterpaduan lintas sektor untuk memastikan kebijakan tidak tumpang tindih, selaras dengan kebijakan lain, dan memperoleh dukungan dalam implementasinya. Terkait dengan itu mengamanatkan Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil dalam menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang menjalankan fungsinya sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden, berupa sinkronisasi dan koordinasi dalam perumusan, penetapan, serta pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil;</li> <li>2. Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil;</li> <li>3. Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil;</li> <li>4. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil; dan</li> <li>5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata.</li> </ol>
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	2.1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, serta Pengendalian Kebijakan di Bidang Hilirisasi Industri Agro
<b>Deskripsi IKU</b>	<p><b>Definisi</b></p> <p>Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) dimensi yaitu Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait Hilirisasi Industri Agro, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian isu strategis dan penyusunan rekomendasi permasalahan dalam komoditas hilirisasi industri agro</li> <li>2. Penyusunan alternatif dan rekomendasi pengembangan bahan baku industri nasional berbasis sumber daya alam</li> </ol> <p>Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) dimensi siklus proses bisnis dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:</p>

**Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan**

Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.

Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan;
- Notula/ Risalah/ Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan;
- Naskah Urgensi;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini antara lain: (i) Undangan rapat dan daftar hadir rapat; (ii) Laporan/diskusi isu strategis dalam komoditas hilirisasi industri agro; (iii) Laporan/diskusi potensi pemenuhan bahan baku industri nasional berbasis sumber daya alam, dsb.

**Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan**

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan perencanaan program;
- Memo Kebijakan;
- Juklak/Juknis;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini antara lain: (i) Laporan terkait alternatif kebijakan terkait Hilirisasi Industri Agro; (ii) Laporan terkait tindak lanjut penyusunan alternatif pengembangan bahan baku industri nasional berbasis sumber daya alam, dsb.

**Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan**

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan);
- Memo Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

	<p>Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini antara lain: (i) Laporan terkait monitoring dan evaluasi kebijakan terkait Hilirisasi Industri Agro; (ii) Laporan terkait Monitoring dan evaluasi konsep pengembangan bahan baku industri nasional berbasis sumber daya alam, dsb.</p> <p><b>Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik</b></p> <p>Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)</li> <li>• Memo Kebijakan;</li> <li>• Rancangan Kebijakan;</li> <li>• Hasil Konsultasi;</li> </ul> <p>Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini antara lain: (i) Konsep dokumen rekomendasi terkait Hilirisasi Industri Agro; (ii) Konsep dokumen rekomendasi pemenuhan bahan baku berbasis sumber daya alam, dsb.</p>	
	<b>Formula</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama</b>  <math display="block">\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%</math> </li> <li><b>Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua</b>  <math display="block">\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%</math> </li> <li><b>Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga</b>  <math display="block">\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%</math> </li> <li><b>Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat</b>  <math display="block">\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%</math> </li> <li><b>Nilai Akhir Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Hilirisasi Industri Agro</b>  <math display="block">\% \text{ efektivitas SKP} = \text{Nilai Tahapan Pertama} + \text{Nilai Tahapan Kedua} + \text{Nilai Tahapan ketiga} + \text{Nilai Tahapan keempat}</math> </li> </ol>	
	<b>Tujuan</b>	
	Untuk mengukur tingkat efektivitas dari proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Hilirisasi Industri Agro	
<b>Satuan Pengukuran</b>	Persentase	
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil	
<b>Pejabat Penanggung Jawab Data</b>	Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil	
<b>Sumber Data</b>	Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil	
<b>Tingkat Kendali IKU</b>	(…) High	(X) Moderate
<b>Tingkat Validitas IKU</b>	(X) Exact	(…) Activity
<b>Jenis Konsolidasi Periode</b>	(…) Sum	(X) Take Last Known Value

<b>Jenis Cascading IKU</b>	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
<b>Metode Cascading</b>	(...) Direct	(X) Indirect	
<b>Polarisasi IKU</b>	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
<b>Periode Pelaporan</b>	(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
<b>TAHUNAN</b>	N/A	N/A	80%	80%	80%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	20%	22,5%	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	40%	46%	40%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	60%	72%	60%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	80%	80%	80%



# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

<b>ASISTEN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO, KIMIA, FARMASI, DAN TEKSTIL</b>	<b>KODE IKU: 2.2</b>
<b>KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN</b>	

<b>Sasaran Strategis</b>	SS.2 Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang berkualitas
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	<p>Kebijakan yang berkualitas ditandai oleh kejelasan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta keterkaitannya dengan visi, rencana pembangunan, dan mandat kelembagaan. Kebijakan yang berkualitas disusun melalui proses yang inklusif dan terkoordinasi, dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait serta mempertimbangkan keterpaduan lintas sektor untuk memastikan kebijakan tidak tumpang tindih, selaras dengan kebijakan lain, dan memperoleh dukungan dalam implementasinya. Terkait dengan itu mengamankan Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil dalam menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang menjalankan fungsinya sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden, berupa sinkronisasi dan koordinasi dalam perumusan, penetapan, serta pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil;</li> <li>2. Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil;</li> <li>3. Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil;</li> <li>4. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil; dan</li> <li>5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata.</li> </ol>
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	2.2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, serta Pengendalian Kebijakan di Bidang Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri
<b>Deskripsi IKU</b>	<p><b>Definisi</b></p> <p>Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) dimensi yaitu Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).</p> <p>Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri mencakup industri kimia hulu, industri kimia hilir, dan farmasi, dan industri pengolahan barang galian non logam, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian isu strategis dan penyusunan rekomendasi dalam rangka mendorong Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri.</li> <li>2. Pelaksanaan evaluasi kebijakan yang meliputi penyusunan Draft RPermenko tentang Koordinasi Percepatan Pengembangan dan Ketahanan Industri Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan hingga pada penetapannya.</li> </ol> <p>Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) dimensi siklus proses bisnis dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:</p>

#### **Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan**

Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.

Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan;
- Notula/ Risalah/ Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan;
- Naskah Urgensi;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini antara lain: (i) Undangan Rapat dan Daftar Hadir Rapat; (ii) Laporan Rapat/Diskusi Isu Strategis Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri; (iii) Laporan Rapat/Diskusi Evaluasi Kebijakan terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri, dsb.

#### **Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan**

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan perencanaan program;
- Memo Kebijakan;
- Juklak/Juknis;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini antara lain: (i) Laporan terkait Penyelesaian Isu Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri; (ii) Laporan terkait Tindak Lanjut Penyusunan Draft RPermenko tentang Koordinasi Percepatan Pengembangan dan Ketahanan Industri Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dsb.

#### **Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan**

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan);
- Memo Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

	<p>Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini antara lain: (i) Laporan terkait Alternatif Penyelesaian Isu Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri; (ii) Rumusan RPermenko tentang Koordinasi Percepatan Pengembangan dan Ketahanan Industri Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dsb.</p> <p><b>Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik</b>  Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)</li> <li>• Memo Kebijakan;</li> <li>• Rancangan Kebijakan;</li> <li>• Hasil Konsultasi;</li> </ul> <p>Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini antara lain: (i) Konsep Dokumen Rekomendasi dalam rangka mendorong Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri; (ii) Dokumen Penetapan Permenko tentang Koordinasi Percepatan Pengembangan dan Ketahanan Industri Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dsb.</p>		
<b>Formula</b>			
	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama</b>  <math display="block">\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%</math></li> <li><b>Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua</b>  <math display="block">\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%</math></li> <li><b>Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga</b>  <math display="block">\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%</math></li> <li><b>Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat</b>  <math display="block">\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%</math></li> <li><b>Nilai Akhir Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri</b>  <math display="block">\% \text{ efektivitas SKP} = \text{Nilai Tahapan Pertama} + \text{Nilai Tahapan Kedua} + \text{Nilai Tahapan ketiga} + \text{Nilai Tahapan keempat}</math></li> </ol>		
<b>Tujuan</b>			
	Untuk mengukur tingkat efektivitas dari proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri		
<b>Satuan Pengukuran</b>	Persentase		
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil		
<b>Pejabat Penanggung Jawab Data</b>	Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil		
<b>Sumber Data</b>	Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil		
<b>Tingkat Kendali IKU</b>	(...) High	(X) Moderate	(...) Low
<b>Tingkat Validitas IKU</b>	(X) Exact	(...) Proxy	(...) Activity

<b>Jenis Konsolidasi Periode</b>	(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
<b>Jenis Cascading IKU</b>	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
<b>Metode Cascading</b>	(...) Direct	(X) Indirect	
<b>Polarisasi IKU</b>	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
<b>Periode Pelaporan</b>	(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
<b>TAHUNAN</b>	N/A	N/A	80%	83%	80%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	20%	21%	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	40%	52,5%	40%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	60%	56,34%	60%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	80%	83%	80%



# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

<b>ASISTEN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO, KIMIA, FARMASI, DAN TEKSTIL</b>	<b>KODE IKU: 2.3</b>
<b>KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN</b>	

<b>Sasaran Kegiatan</b>	SS.2 Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang berkualitas
-------------------------	---

<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	<p>Kebijakan yang berkualitas ditandai oleh kejelasan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta keterkaitannya dengan visi, rencana pembangunan, dan mandat kelembagaan. Kebijakan yang berkualitas disusun melalui proses yang inklusif dan terkoordinasi, dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait serta mempertimbangkan keterpaduan lintas sektor untuk memastikan kebijakan tidak tumpang tindih, selaras dengan kebijakan lain, dan memperoleh dukungan dalam implementasinya. Terkait dengan itu mengamanatkan Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil dalam menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang menjalankan fungsinya sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden, berupa sinkronisasi dan koordinasi dalam perumusan, penetapan, serta pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil;</li> <li>2. Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil;</li> <li>3. Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil;</li> <li>4. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil; dan</li> <li>5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata.</li> </ol>
------------------------------------	--

<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	2.3. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, serta Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki di Pasar Domestik dan Global
--------------------------------------	---

<b>Deskripsi IKU</b>	<b>Definisi</b>
	<p>Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) dimensi yaitu Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik. Rekomendasi yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).</p> <p>Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki di Pasar Domestik dan Global, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemetaan isu strategis dan permasalahan peningkatan daya saing industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) serta Alas Kaki, termasuk pemenuhan aspek keberlanjutan guna mengoptimalkan manfaat I-EU CEPA;</li> <li>2. Evaluasi Kebijakan dan Pembahasan penyelesaian isu serta permasalahan peningkatan daya saing industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) serta Alas Kaki, termasuk pemenuhan aspek keberlanjutan guna mengoptimalkan manfaat I-EU CEPA;</li> <li>3. Penyusunan alternatif penyelesaian isu dan permasalahan peningkatan daya saing industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) serta Alas Kaki, termasuk pemenuhan aspek keberlanjutan guna mengoptimalkan manfaat I-EU CEPA;</li> <li>4. Penyusunan rekomendasi perbaikan/ penyempurnaan kebijakan peningkatan daya saing industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) serta Alas Kaki, termasuk pemenuhan aspek keberlanjutan guna mengoptimalkan manfaat I-EU CEPA..</li> </ol>

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) dimensi siklus proses bisnis dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

#### **Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan**

Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.

Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan;
- Notula/ Risalah/ Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan;
- Naskah Urgensi;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini diantaranya: (i) Konsep Alternatif Kebijakan: Kajian Arah Pengembangan Industri TPT; (ii) Laporan Diskusi Isu Strategis Industri Alas Kaki; (iii) Laporan Diskusi Strategi Integrasi Bahan Baku Berkelanjutan (*Sustainable Material*) dalam Rantai Pasok Industri TPT, dsb.

#### **Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan**

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan perencanaan program;
- Memo Kebijakan;
- Juklak/Juknis;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini diantaranya Laporan terkait Implementasi Kebijakan/Program Industri TPT dan/atau Alas Kaki (i.e Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan pada Industri TPT), dsb.

#### **Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan**

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan);
- Memo Kebijakan;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil Konsultasi;</li> <li>• Laporan Hasil Evaluasi;</li> <li>• Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.</li> </ul> <p>Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini diantaranya: (i) Laporan terkait Evaluasi Kebijakan/Program Industri TPT dan/atau Alas Kaki; (ii) Laporan Monitoring Perkembangan Kinerja Industri Tekstil dan Alas Kaki, termasuk kesiapan Industri dalam Mengoptimalkan manfaat IEU-CEPA, dsb.</p> <p><b>Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik</b></p> <p>Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)</li> <li>• Memo Kebijakan;</li> <li>• Rancangan Kebijakan;</li> <li>• Hasil Konsultasi;</li> </ul> <p>Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini diantaranya: (i) Konsep Dokumen <i>Press Release</i> Kegiatan terkait proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki, (ii) Konsep Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki, dsb.</p>		
	<b>Formula</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama</b>  <math display="block">\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%</math> </li> <li><b>Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua</b>  <math display="block">\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%</math> </li> <li><b>Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga</b>  <math display="block">\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%</math> </li> <li><b>Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat</b>  <math display="block">\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%</math> </li> <li><b>Nilai Akhir Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki di Pasar Domestik dan Global</b>  <math display="block">\% \text{ efektivitas SKP} = \text{Nilai Tahapan Pertama} + \text{Nilai Tahapan Kedua} + \text{Nilai Tahapan ketiga} + \text{Nilai Tahapan keempat}</math> </li> </ol>		
	<b>Tujuan</b>		
	Untuk mengukur tingkat efektivitas dari proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki di Pasar Domestik dan Global sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas		
<b>Satuan Pengukuran</b>	Persentase		
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil		
<b>Pejabat Penanggung Jawab Data</b>	Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil		
<b>Sumber Data</b>	Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil		
<b>Tingkat Kendali IKU</b>	(...) High	(X) Moderate	(...) Low
<b>Tingkat Validitas IKU</b>	(X) Exact	(.....) Proxy	(...) Activity

<b>Jenis Konsolidasi Periode</b>	(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
<b>Jenis Cascading IKU</b>	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
<b>Metode Cascading</b>	(...) Direct	(X) Indirect	
<b>Polarisasi IKU</b>	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
<b>Periode Pelaporan</b>	(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
<b>TAHUNAN</b>	N/A	N/A	80%	84%	80%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	20%	23%	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	40%	46%	40%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	60%	70%	60%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	80%	84%	80%

## MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

<b>ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO, KIMIA, FARMASI, DAN TEKSTIL</b>	<b>KODE IKU:</b> 3.1
<b>KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN</b>	

<b>Sasaran Kegiatan</b>	SS.3 Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang berkualitas
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	<p>Layanan yang berkualitas merupakan layanan yang diselenggarakan secara profesional dan berstandar sehingga mampu memberikan kepastian proses, kemudahan akses, serta hasil layanan yang bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, layanan yang berkualitas ditandai dengan kemampuan penyelenggara layanan dalam merespons kebutuhan, masukan, dan permasalahan secara cepat, tepat, dan solutif, serta memastikan adanya tindak lanjut yang jelas dan terukur. Pelaksanaan layanan yang berkualitas meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Efektivitas fasilitasi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan;</li> <li>b) Responsivitas terhadap kebutuhan koordinasi lintas sektor;</li> <li>c) Akurasi informasi dan berbasis data yang valid;</li> <li>d) Transparansi proses dan hasil pelayanan;</li> <li>e) Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung layanan.</li> </ol>
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	3.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil
<b>Deskripsi IKU</b>	<p><b>Definisi</b></p> <p>Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survei yang dilaksanakan adalah survei skala likert dengan skala 1 sampai dengan 4. Survei akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.</p> <p><b>Formula</b></p> <p>Mengukur indikator tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:</p> $\text{Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian} = \frac{\sum \text{Rerata Jawaban dari masing-masing item survei}}{\text{Jumlah Item Survei}}$ <p>Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk masing-masing unit eselon II, dengan empat kategori penilaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>A. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4</li> <li>B. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50</li> <li>C. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00</li> <li>D. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai &lt;2.50</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <p>Mengukur tingkat kepuasan di proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.</p>
<b>Satuan Pengukuran</b>	Indeks

<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil		
<b>Pejabat Penanggung Jawab Data</b>	Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil		
<b>Sumber Data</b>	Hasil Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil		
<b>Tingkat Kendali IKU</b>	(...) High	(X) Moderate	(...) Low
<b>Tingkat Validitas IKU</b>	(X) Exact	(.....) Proxy	(...) Activity
<b>Jenis Konsolidasi Periode</b>	(....) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
<b>Jenis Cascading IKU</b>	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
<b>Metode Cascading</b>	(...) Direct	(X) Indirect	
<b>Polarisasi IKU</b>	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
<b>Periode Pelaporan</b>	(....) Bulanan	(...) Triwulanan	(X) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	3 dari 4	3,53	3 dari 4
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	3 dari 4	3,35	3 dari 4
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	3 dari 4	3,53	3 dari 4

## MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

<b>ASISTEN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO, KIMIA, FARMASI, DAN TEKSTIL</b>	<b>KODE IKU: 4.1</b>
<b>KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN</b>	

<b>Sasaran Kegiatan</b>	SS.4 Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang berkualitas
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Pelaksanaan tata kelola organisasi yang baik merupakan pengelolaan organisasi yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien melalui kejelasan struktur organisasi, proses bisnis, serta pembagian peran dan tanggung jawab. Tata kelola tersebut bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan secara optimal, berorientasi pada hasil, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara terukur dan berkelanjutan. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Baik merupakan sasaran kegiatan pada Perspektif Pengembangan Internal yang diturunkan dari sasaran strategis Perspektif Pengembangan Internal pada level kedeputian. Ketercapaian sasaran kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas organisasi, sistem kerja, dan sumber daya pendukung, sehingga mampu mendukung terselenggaranya proses bisnis yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan secara efektif di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil.
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	4.1. Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil
<b>Deskripsi IKU</b>	<p><b>Definisi</b></p> <p>Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil merupakan merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.</p> <p>Adapun pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja</li> <li>2. Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU</li> <li>3. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan</li> <li>4. Penyusunan TOR dan RAB atas revisi Renja 2026</li> <li>5. Penyusunan matriks manajemen risiko</li> <li>6. Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI</li> <li>7. Penyusunan Renja 2027</li> <li>8. Penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2027</li> </ol>
	<b>Formula</b>
	<p>Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan/atau RB Tematik di Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil:</p> $\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$

	<b>Tujuan</b>		
	Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil		
<b>Satuan Pengukuran</b>	Persentase		
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil		
<b>Pejabat Penanggung Jawab Data</b>	Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil		
<b>Sumber Data</b>	Rekapitulasi/Tabulasi Data pengumpulan bukti dukung dalam rangka penilaian Reformasi Birokrasi tingkat Kementerian		
<b>Tingkat Kendali IKU</b>	(X) High	(...) Moderate	(...) Low
<b>Tingkat Validitas IKU</b>	(...) Exact	(X) Proxy	(...) Activity
<b>Jenis Konsolidasi Periode</b>	(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
<b>Jenis Cascading IKU</b>	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
<b>Metode Cascading</b>	(...) Direct	(X) Indirect	
<b>Polarisasi IKU</b>	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
<b>Periode Pelaporan</b>	(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
<b>TAHUNAN</b>	N/A	N/A	85%	85%	92%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	20%	20%	25%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	40%	40%	43%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	60%	60%	74%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	85%	85%	92%

	C	D	E	F
	Renaksi	Renaksi Kumulatif	Target	
TW 1	4	4	25%	
TW 2	3	7	43%	
TW 3	5	12	74%	
TW 4	3	15	92%	
Total Renaksi	15			

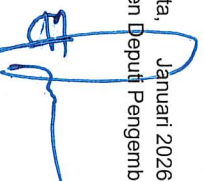
**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO, KIMIA, FARMASI, DAN TEKSTIL**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja				
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Terwujudnya Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas	1.1 Peningkatan Kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB	3,9%	Koordinasi Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Industri AKFT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemetaan isu dan permasalahan strategis terkait produktivitas dan daya saing Industri AKFT</li> <li>Pengumpulan data dan informasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing Industri AKFT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan kegiatan pembahasan isu dan permasalahan strategis terkait produktivitas dan daya saing Industri AKFT</li> <li>Penyusunan alternatif pemecahan isu dan permasalahan strategis produktivitas dan daya saing Industri AKFT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Finalisasi penyusunan alternatif penyelesaian isu dan permasalahan strategis terkait produktivitas dan daya saing Industri AKFT</li> <li>Penyusunan dokumen rekomendasi penyelesaian isu untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing Industri AKFT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing Industri AKFT</li> <li>Monitoring dan evaluasi kebijakan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing Industri AKFT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing Industri AKFT</li> <li>Monitoring dan evaluasi kebijakan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing Industri AKFT</li> </ul>
2	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan di Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas	2.1 Persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Kebijakan terkait Hilirisasi Industri Agro	80%	Rekomendasi kebijakan terkait hilirisasi Industri agro	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemetaan isu strategis dan permasalahan dalam komoditas hilirisasi Industri Agro</li> <li>Pemetaan potensi pemenuhan bahan baku industri nasional berbasis sumber daya alam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan alternatif kebijakan terkait Hilirisasi Industri Agro</li> <li>Penyusunan alternatif pengembangan bahan baku industri nasional berbasis sumber daya alam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi kebijakan terkait Hilirisasi Industri Agro</li> <li>Monitoring dan evaluasi konsep pengembangan bahan baku industri nasional berbasis sumber daya alam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perumusan dan penyusunan rekomendasi terkait Hilirisasi Industri Agro dan pemenuhan bahan baku berbasis sumber daya alam</li> </ul>	
		2.2 Persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Kebijakan terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri	80%	Kebijakan terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemetaan isu strategis dan permasalahan dalam mendorong Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri</li> <li>Pelaksanaan evaluasi kebijakan terkait Penguatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan penyelesaian isu dan permasalahan dalam mendorong Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri</li> <li>Penyusunan Draft RPermenko tentang Koordinasi Percepatan Pengembangan dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan alternatif penyelesaian isu dan permasalahan dalam mendorong Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri</li> <li>Harmonisasi Draft RPermenko tentang Koordinasi Percepatan Pengembangan dan Ketahanan Industri Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perumusan dan penyusunan rekomendasi dalam rangka mendorong Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri</li> <li>Penetapan Permenko tentang Koordinasi Percepatan Pengembangan dan Ketahanan Industri Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan</li> </ul>	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri	Ketahanan Industri Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan isu strategis dan permasalahan peningkatan daya saing Industri Teksstil dan Produk Teksstil (TPPT) serta Alas Kaki, termasuk pemenuhan aspek keberlanjutan guna memanfaatkan manfaat I-EU CEPA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi kebijakan dan Pembahasan penyelesaian isu serta permasalahan peningkatan daya saing Industri Teksstil dan Produk Teksstil (TPPT) serta Alas Kaki, termasuk pemenuhan aspek keberlanjutan guna memanfaatkan manfaat I-EU CEPA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan alternatif penyelesaian isu dan permasalahan peningkatan daya saing industri Teksstil dan Produk Teksstil (TPPT) serta Alas Kaki, termasuk pemenuhan aspek keberlanjutan guna memanfaatkan manfaat I-EU CEPA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perumusan dan penyusunan rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing industri Teksstil dan Produk Teksstil (TPPT) serta Alas Kaki, termasuk pemenuhan aspek keberlanjutan guna memanfaatkan manfaat I-EU CEPA</li> </ul>
3	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Teksstil yang berkualitas	3.1 Indeks Kepuasa Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Teksstil	3 dari 4	<p>Pelaksanaan Survei Kepuasa Layanan Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Teksstil Semester I</p>	<p>Pelaksanaan dan pelaporan survei Kepuasa Layanan Sinkronisasi, dan Pengendalian di Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Teksstil Semester I</p>	<p>Analisis hasil survei Kepuasa Layanan Sinkronisasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Teksstil termasuk menyusun rekomendasi perbaikan survei dan persiapan survei selanjutnya.</p>	<p>Pelaksanaan dan pelaporan survei Kepuasa Layanan Sinkronisasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Teksstil Semester II</p>	
4	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Teksstil yang Berkualitas	4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Teksstil	92%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan capaian kebijakan sistem kerja baru dan fleksibilitas bekerja pegawai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU</li> <li>• Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I</li> <li>• Penyusunan Renja 2027</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II</li> <li>• Penyusunan Revisi Renja 2026</li> <li>• Optimalisasi pemanfaatan SRKANDI Triwulan II</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja</li> <li>• Penyusunan matriks manajemen risiko</li> <li>• Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III</li> <li>• Penyusunan TOR dan RAB atas revisi Renja 2026</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV</li> <li>• Penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2027</li> <li>• Optimalisasi pemanfaatan SRKANDI Triwulan IV</li> </ul>

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
				<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan maturitas SPIP</li><li>• Peningkatan nilai SAKIP</li><li>• Peningkatan capaian Indeks Perencanaan Pembangunan</li><li>• Peningkatan Implementasi digitalisasi arsip</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI Triwulan I</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI Triwulan III</li></ul>	

Jakarta, Januari 2026  
Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil,



**Eripson M.H. Sinaga**  
NIP. 197810102006041004